



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDO ACHMAD ROSADI. S.HUT
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA HUTAN
3. NHK : 426321

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	838.600.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.873 m2/72 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 398.600.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	458.000.000
1. MOTOR, VESPA P 150 X Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKKAR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	248.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	34.964.273
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.579.964.273
III. HUTANG	Rp.	249.569.806
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.330.394.467

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.